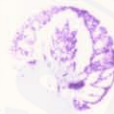


**TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
DITANGGUNG PEMERINTAH (DPT) PADA  
PT. KERETA API DAERAH OPERASI (DAOP) IX JEMBER**

**LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**



Milik UPT Perpustakaan  
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh :

**Fety Rahmatika**

NIM. 980903101040

Dosen Pembimbing :

**Drs. H. HARTONO DJULIANTO**

NIP. 130 610 497

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
2002**

12 OCT 2002

12 OCT 2002

S

Klas

336.271

RAH

t

dan c.1

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : FETY RAHMATIKA  
NIM : 980903101040  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul :

TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) PADA PT. KERETA API DAERAH  
OPERASI (DAOP) IX JEMBER

Jember, 24 Juli 2002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Drs. H. HARTONO DJULIANTO**  
**NIP. 130 610 497**

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:


Nama : FETY RAHMATIKA  
NIM : 980903101040  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

TATA CARA PEMBERIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) PADA PT. KERETA API DAERAH OPERASI (DAOP) IX JEMBER

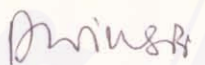
Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Juli 2002  
Jam : 13.00 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

Sekretaris

  
**Drs. H. HARTONO DJULIANTO**  
NIP. 130 610 497

Ketua

  
**Dra. H Dwi Windradini.B.P M.Si**  
NIP. 131 832 302

Mengesahkan,  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan

  
**Drs. H. MOCH TOERKI**  
NIP. 130 524 832



**PERSEMBAHAN**

1. Ayahanda Drs. M. Nur Azzis dan Ibunda Drs. Khuriyatie yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tulus demi keberhasilan putrinya.
2. Kakakku dan adik-adiku, Ahmad Kuriawan, Any Khoirunnisa, Nadiya Fahriyani terima kasih atas kasih sayang, do'a, dorongan serta dukungannya selama ini.
3. Mas Ardhi terima kasih atas semua ketulusan, kesabaran, kebahagiaan serta kasih sayang saat kita berbagi segalanya.
4. Almamaterku tercinta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, Sholawat serta salam ditunjukkan kepada Rasulullah SAW, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahNya dapat menyelesaikan penyusunan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan judul **“Tata cara pemberian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi IX Jember”**. Penulisan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKN) ini untuk memenuhi sebagian dari syarat penyelesaian pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Selesainya laporan ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk moril maupun materiil, untuk itu dengan segala kerendahan hati, dalam kesempatan ini disampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Mud'har Syarifudin M.si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Akhmad Toha M.si selaku Ketua Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Bapak Drs. H Hartono Djulianto, selaku dosen pembimbing laporan yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyusunan laporan ini.
5. Bapak Drs. H Fadhi Said SU, selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat-nasehat.
6. Seluruh staf, dosen dan karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
7. Bapak Drs. Aruwan selaku Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember, serta bapak Sukarno yang telah banyak

memberikan bimbingan, pengarahan dan nasehat selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada Kantor PT. Kereta Api Daerah Operasi IX Jember.

8. Temanku Putu, Dian, Tila, Dewi serta teman-temanku yang ada di Jalan Jawa IVB No. 6 Jember.

Dengan terbatasnya kemampuan dan pengetahuan, disadari bahwa dalam penyusunan laporan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran dari pembaca yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan laporan ini.

Akhirnya besar harapan, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Jember, 25 Juni 2002

Penulis

DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	ii
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	ix
<b>Daftar Lampiran</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja nyata .....	3
1.2.2 Kegunaan praktek kerja nyata .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>	
2.1 Sejarah singkat PT. Kereta Api DAOP IX Jember .....	4
2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api DAOP IX Jember .....	7
2.3 Personalia .....	14
2.4 Uraian Sumber Data Utama .....	18
<b>BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	20
3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	20
3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata .....	23
3.1.2.1 Pengertian PPN Secara umum .....	23
3.1.2.2 Peraturan Tentang PPN Ditanggung Pemerintah .....	27
3.1.2.3 Tata Cara Pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah ...	28



3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Tempat PKN Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya .....	31
-----	--	----

**BAB IV PENUTUP**

Daftar pustaka

Lampiran – lampiran



DAFTAR TABEL

TABEL	Hal
<b>I : Daftar Kegiatan Praktek kerja Nyata Di Kantor PT. Kereta Api DAOP IX Jember .....</b>	<b>23</b>
<b>II : Daftar Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah tahun 2000 Pada PT. Kereta Api DAOP IX Jember .....</b>	<b>30</b>

DAFTAR LAMPIRAN

	Lampiran
1. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata (PKN) .....	1
2. Daftar Hadir .....	2
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata .....	3
4. Faktur Pajak Standard .....	4 - 5
5. Surat Setoran Pajak (SSP) .....	6 - 10
6. Surat Keterangan Permohonan PPN Ditanggung Pemerintah .....	11 - 13
7. Surat Keterangan PPN Ditanggung pemerintah .....	14
8. Bukti Pembelian Barang Langsung / Jasa .....	15
9. Bukti Pembayaran .....	16
10. Daftar suku Cadang Peralatan Untuk Peralatan / Pemeliharaan Serta Prasarana Kereta Api .....	17 - 23

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan bangsa dan negara sangat mempengaruhi semua aspek kehidupan yaitu ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Tumbuh dan berkembangnya masyarakat, bangsa dan negara di tentukan oleh tumbuh dan berkembangnya sarana dan prasarana transportasi, terlihat dari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan kelancaran arus lalu lintas, baik untuk manusia itu sendiri maupun barang-barang yang diperlukan

Kereta Api merupakan salah satu sub sistem dari sistem transportasi nasional. Kereta Api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel, sedangkan perkereta apian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang kereta api untuk penyelenggaraan angkutan kereta api yang disusun dalam suatu sistem (Keputusan Presiden Republik Indonesia No.37 Tahun 1998 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah). Kereta Api sebagai transportasi darat yang mempunyai karakteristik dan keunggulan khusus, terutama dari segi kemampuan angkutan yang masal dan bersamaan, hemat energi, hemat tata ruang dan mempunyai faktor keamanan yang tinggi. Angkutan umum Kereta Api lebih unggul dari transportasi lainnya, karena lebih murah dan aman, mampu memuat barang-barang secara masal dan mempercepat pertumbuhan pembangunan, karena itu keunggulan dan karakteristik tersebut perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Perusahaan Kereta Api merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan Kereta Api dalam rangka memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara masal, sehingga banyak berpengaruh terhadap penerimaan negara, yaitu berasal dari sektor pajak.

Sektor migas untuk saat ini tidak dapat diharapkan dalam menunjang pemasukan anggaran negara, karena merupakan sumber daya yang tidak dapat



diperbaharui, sehingga perlu mencari dana lain yaitu berasal dari pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar dari perekonomian negara, dimana pajak menurut Mardiasmo (1997:1) dalam bukunya berjudul Perpajakan adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran umum.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jendral Pajak No.5-743/PJ-5/1989 tanggal 5 Juni 1989 Perusahaan Kereta Api ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka sejak itulah perusahaan Kereta Api menjadi Wajib Pajak sehingga wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Kereta Api dapat menunjang transportasi laut dan udara, sedangkan angkutan kereta api sebagai sarana strategis dalam pembangunan nasional diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) atas impot dan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang sifatnya strategis untuk pembangunan nasional, sehingga untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah (DTP) terlebih dahulu mengetahui Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang pajak pertambahan nilainya ditanggung pemerintah kemudian baru mengetahui prosedur ataupun tata cara pemberiannya. Berdasarkan latar belakang maka penulis memilih judul "Tata Cara Pemberian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) Pada PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember".

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan

### 1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

1. Mengetahui dan mempelajari tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah pada PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember.
2. Mengetahui sejauh mana peran pemerintah terhadap Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) pada PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember.
3. Ingin memadukan pengetahuan dan teori yang di dapat selama perkuliahan dengan pelaksanaan praktek sebenarnya tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### 1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya PPN yang ditanggung pemerintah.
2. Untuk mempelajari tentang prosedur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah sehingga dapat mengetahui besarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) setiap tahun pada PT. Karet Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember.

## II Gambaran Umum Obyek Praktek Kerja Nyata

### 2.1 Sejarah Singkat PT. Kereta Api DAOP IX Jember

Perkeretaapian di Indonesia lahir kurang lebih pada tahun 1867 pada jaman penjajahan Belanda. Perkembangan kereta api sejak jaman Belanda sampai sekarang secara kronologis dapat di jelaskan sebagai berikut :

#### 2.1.1 Jaman Pemerintahan Hindia Belanda

Pada jaman pemerintahan Hindia Belanda jalan kereta api di Indonesia di bangun oleh Nederlandsch Indische Spoorwegen Maatschappij (NISM) yang di mulai dari tahun 1864 dari desa Kemijen (Semarang) sampai dengan desa Tanggung di kota Magelang sepanjang 25 km, dengan lebar rel 1435 mm. Jalan ini di buka untuk umum pada tanggal 10 Agustus 1867.

Selanjutnya pembangunan jalan kereta api di lakukan juga ke beberapa daerah seperti pulau Jawa, Sumatera Selatan, Sumatera Barat dan Aceh yang pelaksanaan pembangunannya di lakukan oleh Staat Spoorwegen (SS), sedangkan untuk daerah Sumatera Utara di kerjakan oleh Deli Spoorwegen Maatschappij (DSM). Adapun nama perusahaan yang juga Mendapat konsesi membangun jalan baja selain dari perusahaan tersebut di atas sebagai berikut :

- a. Semarang Chirebon Stoomtram Maatschappij (SCSM)
- b. Semarang Joana Stoomtram Maatschappij (SJSM)
- c. Serajudal Stoomtram Maatschappij (SDSM)
- d. Oost Java Stoomtram Maatschappij (OJSM)
- e. Kediri Stoomtram Maatschappij (KSM)
- f. Malang Stoomtram Maatschappij (MSM)
- g. Modjokerto Stoomtram Maatschappij (MdSM)
- h. Pasoeroean Stoomtram Maatschappij (PsSM)
- i. Probolinggo Stoomtram Maatschappij (PdSM)
- j. Madura Stoomtram Maatschappij (Mad.SM)
- k. Nederlandsch Traweg Maatschappij (NIT)



1. Batavia Electriche Maatschappij (BET) Babat Jombang Stoomtram Maatschappij (BJS)

2.1.2 Jaman Penjajah Jepang

Pada jaman kekuasaan Jepang perusahaan perkeretaapian di Indonesia mengalami perubahan pada lintas rel perkeretaapian, yaitu perubahan lintas rel rangkap menjadi lintas rel tunggal. Perubahan di lakukan dengan merubah lebar rel dari 1435 mm menjadi 1067 mm, hal ini di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan rel dan alat-alat lainnya. Hasil perubahan tersebut masih di pakai hingga sekarang.

2.1.3 Masa Proklamasi

Negara Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada kesempatan itu pula pemerintah Republik Indonesia mengambil alih pimpinan perkeretaapian yang berada di pusat dan di daerah-daerah dari penguasaan Jepang. Pengambil alihan tersebut di laksanakan di kantor pusat Bandung pada tanggal 20 September 1945. Sejak itu perkeretaapian di Indonesia di kuasai oleh Dewan Pimpinan Pusat Kereta Api (DKARI), dan sekaligus pada tanggal 28 September di jadikan sebagai hari berdirinya Keretaapian Indonesia.

2.1.4 Masa Sesudah Proklamasi Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan, perkeretaapian di Indonesia mengalami beberapa masa dalam perkembangannya, yaitu :

a. Masa Perang Kemerdekaan

Tahun 1945 sampai 1950 merupakan masa perang kemerdekaan bangsa Indonesia. Kereta api sebagai salah satu unsur sarana pemerintah yang ikut terpengaruh oleh gejolak-gejolak soal ekonomi yang menimpa negara. Kereta api pada masa tersebut di latar belakang oleh adanya perundang-undangan diplomatik dan gigihnya pemerintahan beserta rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.

Pada tahun 1949 di adakan perundingan penyerahan kembali kereta api dari Djawatan Kereta Api (DKA) Republik Indonesia kepada Staat Spoorwegen (SS) milik Belanda dan juga perundingan tentang status perusahaan-perusahaan swasta. Dari hasil

perundingan kemudian di keluarkan suatu pengumuman dari Menteri Perhubungan Tenaga Kerja dan Pekerjaan Umum No.2 tanggal 6 Januari 1950 bahwa DKARI dan SS di gabung menjadi satu Djawatan dengan nama Djawatan Kereta Api. Mulai tanggal 6 Januari 1950 semua pegawai DKARI dan SS menjadi pegawai DKA beserta kekayaan, hak dan kewajibannya.

#### b. Peleburan DKA Menjadi PNKA

Berdasarkan Undang-undang No.56 tahun 1957 perusahaan kereta api milik swasta menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Pengoperasian kereta api selama di pegang oleh DKA menghadapi masalah-masalah yang demikian berat, persediaan alat-alat penambat rel semakin berkurang, jalan rel, gedung dan jembatan rusak, sehingga kondisi sarana dan prasarana perkeretaapian di Indonesia semakin berkurang.

Dalam rangka penertiban perusahaan-perusahaan milik negara, selanjutnya pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1963 di mana tanggal 25 Mei 1963 DKA di lebur menjadi PNKA (Perusahaan Negara Kereta Api) yang pelaksanaannya baru di mulai tanggal 1 Januari 1965.

#### c. Sesudah Tahun 1970

Pada tahun 1970 dengan maksud menyehatkan perusahaan maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 dan peraturan pemerintah No. 6 tahun 1971, bentuk PNKA di alihkan menjadi bentuk PERJAN dengan nama PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api). Perkembangan terakhir PJKA dalam rangka pelimpahan sebagian wewenang pemerintah, maka dengan Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1990 PJKA di rubah bentuknya menjadi PERUMKA (Perusahaan Umum Kereta Api).

PJKA yang sudah menjadi PERUMKA kemudian sedikit demi sedikit berbenah diri, seperti struktur organisasi yang dulunya terbagi atas beberapa eksploitasi kemudian terbagi lagi menjadi beberapa inspeksi. Selanjutnya sejak tanggal 1 Juli 1989 melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 42 tahun 1989 mulai berlaku struktur organisasi yang baru, di mana Perusahaan Umum Kereta Api terbagi atas beberapa



KAWILU (Kepala Wilayah Usaha) dan wilayah usaha tersebut terbagi lagi menjadi beberapa daerah operasi. Terjadinya perubahan-perubahan pada struktur organisasi tersebut menjadi luas dan kekuasaan organisasi akan semakin sempit. Bentuk Perusahaan Umum Kereta Api resmi sejak tanggal 30 Oktober 1990 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990.

#### d. Tahun 1999 Sampai Sekarang

Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1990 tepatnya tanggal 30 Oktober 1990, di mana Perusahaan Jawatan Kereta Api di ubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api. Dalam masa perubahan itu PERUMKA semakin membaik dan berkembang pesat, sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1998 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Kereta Api menjadi (Persero) dan Akte Notaris Ima Fatimah, SH serta di landasi dengan Surat Keputusan Presiden RI No. 30 tahun 1999, tanggal 9 Juni 1999 PERUMKA berubah status menjadi Persero dengan nama PT. Kereta Api (Persero).

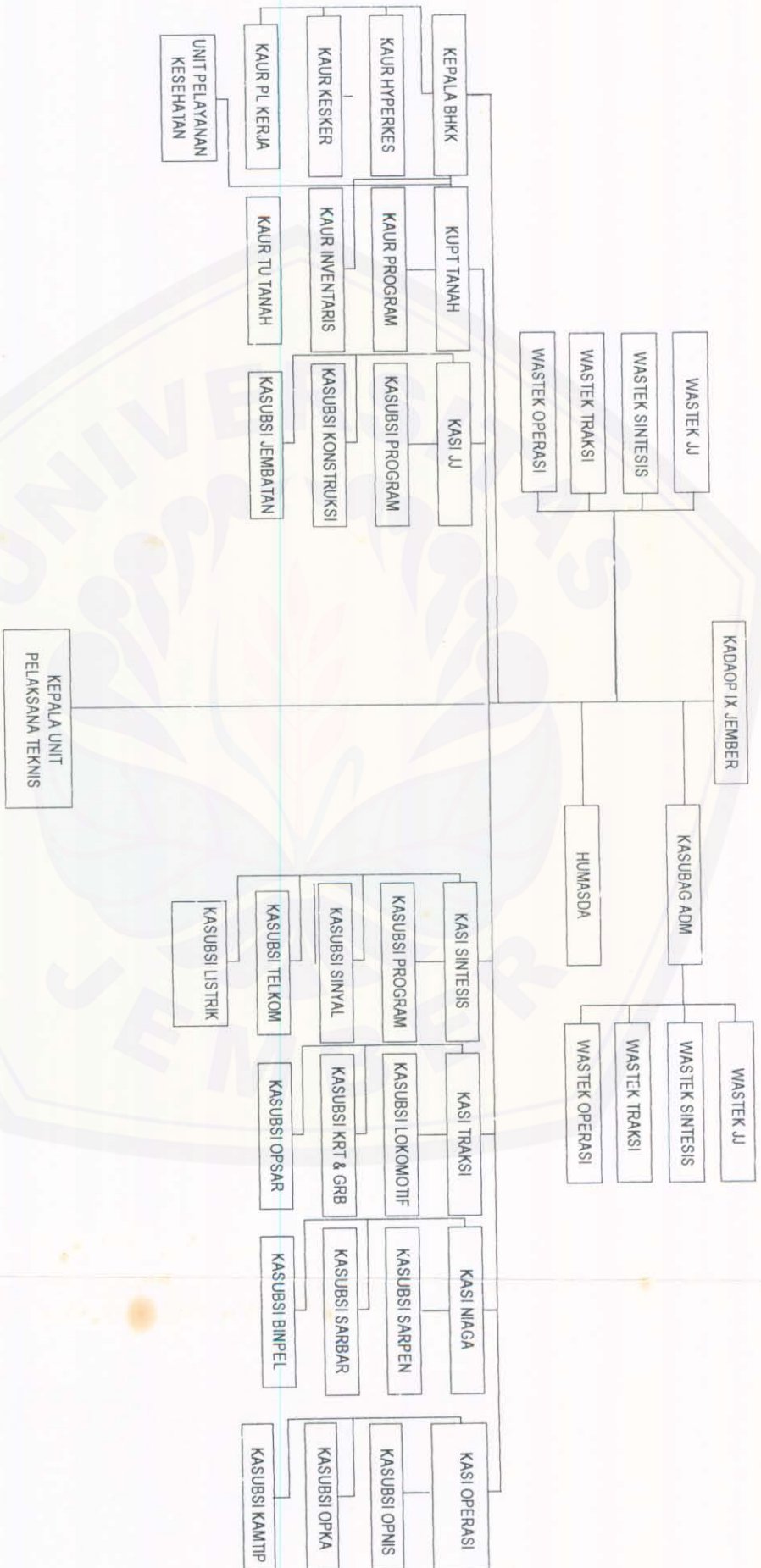
Dengan perubahan status tersebut peran pemerintah dalam pengelolaan perusahaan akan berkurang. Bantuan sebagai mana pernah di berikan kepada PERUMKA tidak lagi di lakukan, dengan berubahnya PERUMKA menjadi Persero beberapa hal yang perlu di tingkatkan antara lain perusahaan harus lebih bisa mandiri dan berorientasi kepada laba agar dapat berkembang. Untuk itu pelayanan harus baik, produksi harus lebih efisien dan perusahaan harus lebih luwes dalam menjalin hubungan dengan swasta melalui kerja sama yang saling menguntungkan.

## 2.2 Struktur Organisasi PT. Kereta Api

Struktur organisasi yang di gunakan pada PT. Kereta Api (Persero) DAOP IX Jember adalah gabungan antara struktur organisasi garis dan dan staf yang di mulai dari tingkat pusat yaitu Direktur Utama (Dirut) berkedudukan di Bandung, di mana Dirut tersebut membawahi langsung beberapa KADAOP (Kepala Daerah Operasi). Masing-masing KADAOP di dalam melaksanakan tugasnya mengkomandani langsung UPT (Unit Pelaksana Teknis) sedangkan di dalam melaksanakan tugasnya UPT di bantu oleh Kepala Stasiun (KS), Kepala Dipo Lokomotif dan Kepala Dipo Kereta (KDK).



**PT. Kereta Api Indonesia**  
**Struktur Organisasi Daerah Operasi IX Jember**



Sumber Data : PT. Kereta Api Daop IX Jember.

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah :

A. Kepala Sub Bagian Administrasi (KASUBAG ADM)

Kepala Sub Bagian Administrasi bertugas menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi daerah operasi IX Jember, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu :

a. Kaur Personalia

Kepala urusan personalia bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian, seperti jumlah tenaga kerja, kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan penarikan tenaga kerja baru dilingkungan DAOP IX Jember.

b. Kaur Keuangan

Kepala urusan keuangan, bertugas mengurus sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan dilingkungan DAOP IX Jember, antara lain mengenai kegiatan penerimaan maupun pengeluaran keuangan perusahaan.

c. Kaur Anggaran dan Akuntansi

Kepala urusan anggaran dan akuntansi bertugas mengurus segala macam bentuk anggaran dan pembukuan dan pendapatan maupun pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan.

d. Kaur Umum

Kepala urusan umum bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan pengurusan inventaris dan tata laksana surat menyurat di lingkungan DAOP IX Jember.

B. Pengawas Teknik (WASTEK)

KADAOP mempunyai pembantu dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap semua tugas di tiap – tiap kepala seksi (KASI) didinasnya masing – masing, tetapi pengawasan ini tidak mempunyai perintah langsung kepada para KASI tersebut hanya sekedar membantu jalannya pelaksanaan operasi Pengawas tersebut antara lain:

- a. Pengawas Teknik Jalan Rel dan Jembatan (WASTEK JJ)  
Pengawas teknik jalan rel dan jembatan bertugas dan bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhubungan dengan bidang jalan rel dan jembatan di DAOP IX Jember.
  - b. Pengawas Teknik Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (WASTEK SINTELIS)  
Pengawas teknik sinyal, telekomunikasi dan listrik bertugas dan bertanggung jawab atas sesuatu yang berhubungan dengan bidang sinyal, telekomunikasi dan listrik di DAOP IX Jember.
  - c. Pengawas Teknik Traksi (WASTEK TRAKSI)  
Pengawas teknik traksi bertugas dan bertanggung jawab dibidang traksi.
  - d. Pengawas Teknik Operasi (WASTEK OPERASI)  
Pengawas teknik operasi bertugas dan bertanggung jawab serta pengawasan bidang pelaksanaan operasi di DAOP IX Jember.
- C. Hubungan Masyarakat Daerah (HUMASDA)  
Hubungan masyarakat daerah bertugas dan bertanggung jawab terhadap hubungan dengan masyarakat melalui media massa maupun elektronik, termasuk menangani masalah promosi yang diadakan perusahaan.
- D. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (KUPT)  
Kepala unit pelaksana teknis bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah dalam melaksanakan segala operasi yang diperintahkan oleh KADAOP, dimana KUPT ini dalam melaksanakan tugasnya dilintas kepalai oleh kepala stasiun.
- E. Kepala Balai Higiene Keselamatan Kerja (Kepala BHKK)  
Kepala balai higiene keselamatan kerja bertugas bertanggung jawab terhadap pemeriksaan para pegawai termasuk pengadaan obat – obatan, dalam melaksanakan tugas – tugasnya dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Hyperkes (Kaur Hyperkes)  
Kepala urusan hyperkes bertugas dan bertanggung jawab mengenai masalah kesehatan karyawan di wilayah DAOP IX Jember.



- b. Kepala Urusan Keselamatan Kerja (Kaur Kesker)  
Kepala urusan keselamatan kerja bertugas dan bertanggung jawab terhadap perlengkapan keselamatan kerja bagi pegawai teknik dilapangan.
  - c. Kepala Urusan Perlindungan Kerja (Kaur PL Kerja)  
Kepala urusan perlindungan kerja bertugas memberi perlengkapan kepada para pegawai seperti jas hujan dan pemadam kebakaran.
- F. Kepala Urusan Tanah dan Bangunan (KUPT Tanah)
- Kepala urusan tanah dan bangunan bertugas dan bertanggung jawab mengenai sewa menyewa aset tak bergerak, melaksanakan pembangunan, renovasi (aset tak bergerak). KUPT ini dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. Kepala Urusan Program (Kaur Program)  
Kepala urusan program bertugas dan bertanggung jawab dalam memprogram segala kegiatan yang berhubungan dengan dinasny.
  - b. Kepala Urusan Inventaris (Kaur Inventaris)  
Kepala urusan inventaris bertugas dan bertanggung jawab terhadap inventaris (aset tak bergerak).
  - c. Kepala Urusan Tata Usaha Tanah (Kaur TU Tanah)  
Kepala urusan tanah bertugas dan bertanggung jawab mengenai penyewaan tanah, penyertifikatan tanah di notaris dan membuat perjanjian tentang sewa.
- G. Kepala Seksi (KASI)
- Kepala seksi bertugas membantu melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh KADAOP, kepala seksi tersebut antara lain :
- a. Kepala Seksi Jalan Rel dan Jembatan (KASI JJ)  
Kepala seksi jalan rel dan jembatan bertugas dan bertanggung jawab terhadap perbaikan dan pemeliharaan jalan rel dan jembatan kereta api.  
Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kasubsi Program
  2. Kasubsi Konstruksi
  3. Kasubsi Jembatan
- b. Kepala Seksi Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik (KASI SINTELIS)
- Kepala seksi sinyal, telekomunikasi dan listrik bertugas dan bertanggung jawab terhadap perawatan dan pemeliharaan dibidang sinyal, telekomunikasi dan perlistrikan. Adapun dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
1. Kasubsi Program
  2. Kasubsi Sinyal
  3. Kasubsi Telkom
  4. Kasubsi Listrik
- c. Kepala Seksi Traksi
- Kepala seksi traksi bertugas dan bertanggung jawab serta mengkoordinir atas segala kelancaran perjalanan kereta api serta bertugas mengatur peredaran lokomotif dan kereta api di DAOP IX Jember. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kasubsi Lokomotif
  2. Kasubsi Kereta dan Gerbong
  3. Kasubsi Operasi Sarana (OPSAR)
- d. Kepala Seksi Niaga (KASI Niaga)
- Kepala seksi niaga bertugas mengenai sarana transportasi, pemasaran, angkutan penumpang maupun barang dan memberikan pelayanan kepada pengguna jasa kereta api. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
1. Kasubsi Sarana Pemasaran (SARPEN)
  2. Kasubsi Sarana Barang (SARBAN)
  3. Kasubsi Bina Pelanggan (BINPEL)

e. Kepala Seksi Operasi (KASI Operasi)

Kepala seksi operasi bertugas dan bertanggung jawab terhadap operasional kereta api secara teknis, termasuk mengendalikan perjalanan kereta api, mengendalikan perjalanan operasional kereta api serta menjaga keamanan dan ketertiban jalannya kereta api. Adapun dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

1. Kasubsi Operasioanal Tekhnis (OPNIS)
2. Kasubsi Operasional Kereta Api (OPKA)
3. Kasubsi Perjalanan Kereta Api (PERKA)
4. Kasubsi Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB)

Struktur Organisasi Keuangan :



Sumber data : Kantor PT. Kereta Api DAOP IX Jember.

Tugas dari masing-masing kepala sub urusan adalah :

1. Kepala Sub Urusan Pengawas I (Internal)

Kepala sub urusan pengawas I bertugas mengurus masalah yang berhubungan dengan :



- a. Hak pegawai perusahaan, termasuk juga perjalanan dinas.
  - b. Sumbangan pemondokan, sumbangan sewa rumah.
  - c. Umulemen atau premi pegawai.
  - d. Restitusi pengobatan.
  - e. Gaji pegawai.
  - f. Honor Pegawai.
  - g. Tunjangan efisiensi.
  - h. Tunjangan hari raya keagamaan.
  - i. Pembayaran santunan kematian.
  - j. Persekot gaji.
  - k. Biaya boyong pegawai (dipindahkan keluar DAOP).
  - l. Pemotongan dana Taspen dan dana pensiun.
2. Kepala Sub Urusan Pengawas II (External).
- Kepala sub urusan pengawas bertugas menangani masalah yang berhubungan dengan :
- a. Seluruh pembayaran pada pihak ketiga atau rekanan.
  - b. Segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak, termasuk penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak.
  - c. Segala utang-piutang.

### 2.3 Personalia

Masalah personalia merupakan salah satu faktor utama dan selalu ada dalam setiap perusahaan walaupun menggunakan mesin-mesin modern. Pada PT. Kereta Api DAOP IX Jember dimana tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang sama pentingnya.

2.3.1 Keadaan Karyawan

Keadaan karyawan PT. Kereta Api DAOP IX Jember di bagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Tenaga Kerja Organik.

Tenaga kerja organik adalah tenaga kerja yang di atur berdasarkan peraturan pemerintah dan sudah mendapat Nomor Induk Pegawai Perusahaan (NIPP). Jumlah tenaga kerja organik adalah 1655 orang. Adapun kekuatan tenaga kerja / pegawai tersebut di golongkan sebagai berikut :

a. Kekuatan Pegawai Per Pendidikan dan Golongan

Golongan	Pendidikan							Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
IV	0	0	0	0	0	0	1	1
III	0	50	28	50	10	10	2	150
II	0	650	350	286	7	15	0	1308
I	20	112	15	49	0	0	0	196
Jumlah	20	812	393	385	17	25	3	1655

b. Kekuatan Per Status dan Usia

Usia	Status					Jumlah
	Capeg	Perum Murni	Perum exmurni	PNS	BT	
18 – 25 th	9	15	62	0	8	94
26 – 30 th	9	19	108	0	5	132
31 – 35 th	0	40	37	0	4	81
36 – 40 th	0	35	4	1	1	41
41 – 45 th	0	210	20	0	4	334
46 – 50 th	0	25	614	0	5	644
51 – 55 th	0	15	314	0	0	329
Jumlah	18	359	1250	1	27	1655

c. Kekuatan Pegawai Per Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Pria	1648 Orang
Wanita	7 Orang
Jumlah	1655

2. Tenaga Kerja Non Organik.

Tenaga kerja non organik diartikan sebagai Pekerja Harian Lepas (PLH) yaitu tenaga kerja yang statusnya pegawai negeri sipil dan tidak diatur menurut peraturan pemerintah. Tenaga kerja non organik dapat diartikan sebagai tenaga kerja bebas tugas. Jumlah tenaga kerja non organik ini ada 171 orang dimana terdiri dari :

a. Pekarya Perusahaan (PKP)

Pekarya perusahaan disebut juga sebagai pegawai perusahaan. Jumlah PKP ini ada 106 orang.

b. Pegawai Kontrak (PK)

Pegawai kontrak adalah pegawai yang telah dikontrak oleh perusahaan sesuai dengan tahun yang telah ditentukan. Seluruh pegawai kontrak (PK) ini ada 65 orang. Adapun kekuatan tenaga kerja atau pegawai dapat digolongkan sebagai berikut :

a. Kekuatan Pegawai Per Pendidikan

Pendidikan	PKP	PK
< SD	0 Orang	1 Orang
SD	61 Orang	6 Orang
SLTP	18 Orang	30 Orang
SLTA	25 Orang	29 Orang
D III	1 Orang	0 Orang

b. Kekuatan Pegawai Per Usia

Usia	PKP	PK
18-35 th	50 Orang	62 Orang
36-40 th	18 Orang	3 Orang
41-55 th	38 Orang	0 Orang

b. Kekuatan Pegawai Per Jenis Kelamin

Jenis	PKP	PK
Pria	90 Orang	62 Orang
Wanita	16 Orang	3 Orang



### 2.3.2 Pembayaran Gaji dan Upah

- a. Pembayaran gaji terhadap pegawai (tenaga kerja organik) perusahaan PT. Kereta Api DAOP IX Jember adalah :
  1. Berdasarkan pada peraturan penggajian yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan No.SE-28/A/31/1999, tanggal 5 Maret tahun 1997. Kepada pegawai PNS di bayarkan gaji pokok terhitung mulai tanggal 1 April 1997 gaji pokok baru bagi PT. Kereta Api DAOP IX Jember.
- b. Pembayaran upah terhadap tenaga kerja non organik di artikan sebagai Pekerja Harian Lepas (PLH) adalah tenaga kerja yang status pembayaran upah pegawai negeri sipil dan tidak di atur menurut peraturan pemerintah. Tenaga kerja non organik dapat diartikan sebagai tenaga kerja bebas tugas.

### 2.3.3 Kesejahteraan Karyawan

Fasilitas-fasilitas lain yang di berikan pada karyawan PT. Kerta Api DAOP IX Jember antara lain :

1. Fasilitas Perumahan.  
Fasilitas ini di berikan kepada PT. Kereta Api pada pejabat dan karyawan yang membutuhkan.
2. Fasilitas Perjalanan Dinas dan Pindah.  
Perjalanan dinas PT. Kereta api Jember atas surat pemerintah mendapat biaya perjalanan, begitu pula bila di mutasi mendapatkn tunjangan pindah.
3. Fasilitas Perawatan Karyawan PT. Kereta Api Jember.  
Untuk semua pegawai dan keluarganya, sebagian biaya rumah sakit di tanggung PT. Kereta Api.

### 2.3 Uraian Sumber Data Utama

PT. Kereta Api selain Wajib Pajak juga sebagai pemungut pajak khususnya pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Seksi perpajakan termasuk dalam bagian urusan keuangan yang bertugas mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah keuangan, antara lain mengenai kegiatan penerimaan maupun pengeluaran keuangan perusahaan kereta api.

Tugas seksi perpajakan khususnya untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut:

1. Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pajak keluaran dan pajak masukan. Dalam pajak masukan maupun pajak keluaran ini terdapat perjanjian dengan angkutan pupuk PT. Pusri, yaitu:
  - a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan oleh PT. Kereta Api kepada PT. Pusri terhadap kegiatan diluar angkutan kereta api disebut Pajak Keluaran bagi PT. Kereta Api dan Pajak Masukan bagi PT. Pusri.
  - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh PT. Kereta Api atas Biaya Angkutan Lanjutan (BAL) dari para pelaksana angkutan lanjutan / bongkar muat tersebut Pajak Masukan bagi PT. Kereta Api dan sebagai Pajak Keluaran bagi pihak pelaksana angkutan / bongkar muat.
2. Mengeluarkan surat bukti pembelian barang / jasa secara langsung ataupun pembelian barang persediaan untuk masing-masing transaksi sesuai dengan faktur pajak yang ada.
3. Mengeluarkan surat bukti pembayaran setiap ada transaksi dengan pihak ketiga (rekanan ) dimana bukti pembayaran ini akan diberikan pada pihak ketiga. Pembayarannya dilakukan dengan cara:
  - a. Untuk transaksi yang lebih dari Rp. 5.000.000,- pembayarannya dengan clearing yaitu pengiriman uang antar bank sesuai dengan bank yang telah ditunjuk masing-masing.
  - b. Untuk transaksi kurang dari Rp. 5.000.000,- pembayarannya bisa diambil langsung pada kas bendahara.
4. Apabila ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung pemerintah ( DTP) maka membuat surat keterangan permohonan Pajak Pertambahan Nilai

Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dibebaskan atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu untuk disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

5. Bila surat keterangan permohonan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung pemerintah telah keluar selanjutnya memberi stempel Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dengan nomor keterangannya pada faktur pajak sederhana yang telah diperoleh dari pihak ketiga (rekanan).
6. Merekap seluruh Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berdasarkan faktur pajak sederhana kemudian melaporkannya pada kantor pusat di Bandung.
7. Merekap semua Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang di pungut PT. Kereta Api, kemudian mengisinya dalam Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut lalu mengirimkan hasil rekapan tersebut pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan kantor pusat di Bandung.
8. Mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) untuk setiap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pungut (Wapu) kemudian menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut pada bank persepsi.



## III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Praktek kerja nyata dilaksanakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) khususnya bidang perpajakan, oleh sebab itu mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan praktek kerja nyata. Sebelum melaksanakan praktek kerja nyata mahasiswa di berikan pengarahan oleh ketua progrm studi mengenai prosedur pelaksanaan dan obyek praktek kerja nyata. Mahasiswa dapat melaksanakan praktek kerja nyata apabila sudah menyelesaikan minimal 100 sks dan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) baru dapat dilaksanakan setelah Kartu Hasil Studi (KHS) diterima serta Kartu Rencana Studi (KRS) telah diprogram oleh mahasiswa. Pelaksanaan PKN harus dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program yang telah ditentukan.

Sebelum melaksanakan PKN mahasiswa harus membuat proposal yang ditujukan kepada perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apa latar belakang, tujuan dan kegunaan PKN. Apabila perusahaan, BUMN atau BUMD tidak memerlukan proposal maka mahasiswa tidak perlu membuat proposal. Mahasiswa harus meminta surat ijin PKN kepada bagian akademik untuk diserahkan kepada perusahaan, BUMN atau BUMD, setelah mendapat surat balasan tentang diterimanya PKN ditenpat tersebut maka bagian akademik akan membuat surat tugas yang di tujukan kepada perusahaan, BUMN atau BUMD yang bersedia menerima mahasiswa untuk melaksanakan PKN tersebut.

#### 3.1.1 Tempat, Waktu dan Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Penulis memilih tempat pada Kantor PT. Kereta Api DAOP IX Jember sebagai tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN), karena menurut Surat Edaran No. 5-734/ PJ-05/ 1989 perusahaan kereta api di tetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka sejak itulah perusahaan kereta api menjadi Wajib Pajak sehingga wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perusahaan kereta api merupakan salah satu BUMN yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka

memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara masal tentunya tidak terlepas dari motivasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Semakin banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan Kereta Api maka semakin banyak pula pajak yang harus disetorkan sehingga akan menguntungkan bagi negara. Perusahaan Kereta Api Daerah Operasi (Daop) IX Jember berkedudukan di daerah kota Administratif Jember, tepatnya di kecamatan Patrang, Kelurahan Jember Lor jalan Dahlia No.02. Kota administratif Jember berada di lintas utara yang menghubungkan kota Surabaya dan Banyuwangi. Luas wilayah Perusahaan Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember meliputi kota Banyuwangi sampai sinyal masuk stasiun Bangil dan utara Panarukan. Luas daerahnya meliputi 209,652km lintas raya dan 225,525km lintas cabang, panjang rel kereta api kurang lebih 340,5km.

Jangka waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) pada PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember adalah mulai tanggal 6 Maret sampai dengan 6 April 2001 yaitu:

1. Hari Senen s/d Kamis : 07:00-12:00
2. Hari Jumat : 07:00-11:00
3. Hari Sabtu : Libur

Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut:

- a. Minggu pertama, di adakan pembukaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember. Disini mulai mengetahui tempat melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan mulai diperkenalkan dengan para staf dan karyawan pada Kantor PT. Kereta Api DAOP IX Jember. Mahasiswa ditempatkan pada bagian keuangan yang di kepalai oleh Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) khususnya pada seksi yang menangani masalah pajak yang ada dikantor ini.
- b. Minggu ke dua, mulai bertanya tentang pajak-pajak yang ada di Kantor Kereta Api DAOP IX Jember sehingga mengetahui pajak-pajak yang ada, antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada minggu ini masing- masing anak mulai memilih judul yang akan dibuat laporan dan mulai mencari data-data yang diperlukan.



- c. Minggu ke tiga, mahasiswa sudah mulai mengajukan judul dan telah mendapatkan dosen pembimbing sehingga bisa berkonsultasi dengan dosen tentang data-data yang harus di cari untuk judul yang mereka pilih. Pada minggu ke tiga ini kita sudah terjun langsung menangani pajak yaitu di beri tugas menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), memasukkan ke dalam faktur pajak standart dan memberikan stempel pada faktur pajak tersebut. Disini kita benar-benar sudah mengetahui pajak yang harus di tanggung pemerintah pada Kantor Kereta Api Daop IX Jember.
- d. Minggu ke empat, kita sudah benar-benar mantap dengan judul yang kita pilih dan telah memiliki data-data yang kita perlukan. Pada minggu ini kita mencari data tentang struktur organisasi pada PT.Kereta Api Daop IX Jember kepada bagian personalia. Pada minggu terakhir ini di adakan penutupan PKN sekaligus perpisahan dengan para staf dan karyawan PT Kereta Api Daop IX Jember dengan cara berjabatn tangan dan mengucapkan terima kasih.

Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat pada tabel daftar kegiatan PKN berikut ini :



No	Jenis Kegiatan	Minggu			
		I	II	III	IV
1.	Pembukaan PKN di Kantor PT. KA Daop IX Jember.	x			
2.	Perkenalan Tempat PKN (di tempatkan pada bagian keuangan) dan obyek PKN.	x			
3.	Perkenalan dengan para staf dan karyawan PT. KA Daop IX Jember.				
1.	Mengetahui secara umum tentang pajak-pajak yang ada pada PT. KA Daop IX Jember.		x		
2.	Mengetahui barang-barang apa saja dan jasa apa saja yang PPN nya di tanggung pemerintah.		x		
1.	Menghitung PPN DTP yang ada pada kantor PT. KA Daop IX Jember setiap bulannya.			x	
2.	Memasukkan PPN DTP tersebut pada faktur pajak standart dan memberikan stempel pada faktur tersebut.			x	
3.	Menghitung jumlah uang yang harus di bayar pada rekanan setelah di kurangi PPN DTP.			x	
1.	Mencari data struktur organisasi pada PT. KA Daop IX Jember.				x
2.	Penutupan PKN, perpisahan dengan para staf dan karyawan PT. KA Daop IX Jember.				x
3.	Mengucapkan terima kasih dan berjabat tangan dengan segenap staf dan karyawan PT. KA Daop IX Jember.				x

Sumber data : Data diolah.

### 3.1.2 Hasil Praktek Kerja Nyata.

#### 3.1.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Secara Umum

Pajak merupakan penerimaan terbesar bagi negara di mana pajak sangat berperan penting di dalam pembangunan nasional, karena pajak merupakan satu-satunya sumber dana yang berasal dari dalam negeri. Pada saat ini pajak sangat membantu sekali dalam pembangunan negara karena dari sektor pajak pemerintah dapat membiayai pengeluaran negara guna kemakmuran bersama, maka dari itu peran pajak sebagai penerimaan negara harus lebih di tingkatkan.

Perusahaan Kereta Api merupakan wajib pajak, dimana wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Kereta api merupakan salah satu alat transportasi yang ada di Indonesia, sehingga untuk menunjang kelancaran transportasi laut, udara dan angkutan, kereta api sebagai sarana strategi dalam pembangunan nasional di berikan fasilitas PPN ditanggung oleh pemerintah atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 37 tahun 1989 yaitu tentang PPN yang terutang atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu yang di tanggung pemerintah, dimana diperbaharui lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/ KMK. 04/ 2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang pemberian dan penata usahaan PPN dibebaskan atas impor dan atau atau penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tertentu.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) :

PPN adalah pajak atas konsumsi barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean.

Objek Pajak Pertambahan Nilai adalah :

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak (BKP).
- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak (BKP).
- g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan.

Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara umum :

- a. Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut pajak terutang. Pajak yang di pungut di sebut Pajak Keluaran (PK).



- b. Pada saat PKP tersebut membeli BKP atau menerima JKP dari PKP lain, juga membayar pajak terhutang yang dinamakan Pajak Masukan (PM).
- c. Pada akhir masa pajak, Pajak Masukan (PK) tersebut di kreditkan dengan Pajak Keluaran. Jika  $PK > PM$  berarti terjadi kurang bayar yang harus disetor ke kas negara. Jika  $PM > PK$  maka terjadi lebih bayar yang dapat dikompensasikan dengan utang pajak masa pajak berikutnya atau restitusi.
- d. Pada akhir masa pajak, setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan melaporkan pemungutan dan pembayaran pajak yang terhutang pada Kantor Pelayanan Pajak, selambat-lambatnya tanggal 20 setelah akhir masa pajak.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu di tanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Jasa yang di serahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan.
- b. Jasa oleh kontraktor dalam rangka pembangunan tempat-tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah.
- c. Jasa persewaan Rumah Susun Sederhana.
- d. Jasa yang diterima oleh Pelayaran Niaga yang meliputi:
  - 1. Jasa persewaan kapal .
  - 2. Jasa kepelabuhan meliputi jasa pandu, jasa tambat, dan jasa labuh.
  - 3. Jasa persewaan/ resparasi kapal.
- e. Jasa yang di terima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga yang meliputi:
  - 1. Jasa persewaan pesawat udara.
  - 2. Jasa perawatan/ reparasi pesawat udara.
- f. Jasa perawatan/reparasi kereta api yang di terima oleh Perusahaan Kereta Api.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu di tanggung pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Kapal laut yang di pergunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan Pelayaran Niaga.
- b. Kapal angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang di gunakan untuk angkutan umum oleh Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
- c. Kapal pandu dan kapal tunda yang di gunakan di pelabuhan umum.



- d. Kapal penangkap ikan.
- e. Pesawat udara yang di gunakan Perusahaan Angkutan Udara Niaga.
- f. Kereta Api yang di gunakan Perusahaan Kereta Api.
- g. Suku cadang dan alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia.
- h. Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana kereta api.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 10/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001, tentang pemberian dan penata usahaan PPN di bebaskan atas impor penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu. Adapun langkah-langkah yang perlu di ditetapkan untuk pelaksanaan PPN di bebaskan pada PT. Kereta Api (Persero) untuk setiap kegiatan impor atau penyerahan BKP tertentu atau JKP tertentu adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan rencana biaya oleh perencana, dan Surat Penawaran Harga dari Rekanan, harga barang atau jasa adalah sebesar nilai bruto (termasuk PPN 10 %).
2. Dalam pembuatan kontrak/surat perjanjian/SPK, harus mencantumkan nilai sebagai berikut :
  - a. Nilai Rupiah Bruto, termasuk Nilai PPN Dibebaskan (total 110 %).
  - b. Nilai Rupiah PPN Dibebaskan (10%).
  - c. Nilai Rupiah Netto yang akan di bayarkan oleh PT. Kereta Api kepada pihak yang menyerahkan BKP atau JKP (100 %).
3. Daftar nama barang dalam lampiran kontrak di rinci per-jenis barang dengan komponen harga.
4. Nilai SIP adalah sebesar Nilai Netto yang di perhitungkan pada rencana biaya atau pada Berita Acara Hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung (BAHP) apabila di protes dengan cara pelelangan/pemilihan langsung ( $100/110 \times$  total biaya).

### 3.1.2.2 Peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah.

Peraturan-peraturan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa angkutan kereta api:

1. Dalam keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 700/KMK.05/1985, sejak tanggal 1 Juli 1985 atas pemasukan barang-barang (impor) terhadap barang-barang untuk keperluan Perkereta-apian oleh Perusahaan Jawatan Kereta Api di bebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 199, mengatur pedoman pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan yang terutang pajak dan yang tidak terutang pajak.
3. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 37 Tahun 1998, atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis untuk keperluan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ditanggung pemerintah.
4. Dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204 Tahun 1998 jo Butir 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor :SE-01/PJ.52/1999 tanggal 8 April 1998, jasa perawatan / resparasi kereta api yang diterima perusahaan kereta api, Pajak Pertambahan Nilai (PPN ) yang terutang di tanggung pemerintah.
5. Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 329/KMK.04/1999 tanggal 18 Juni 1999. Barang Kena Pajak (BKP) yang bersifat strategis antara lain kereta api beserta suku cadang dan peralatan atas impor atau penyerahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang ditanggung pemerintah sepanjang yang mengimpor dan /atau membeli adalah Perusahaan Kereta Api.



### 3.1.2.3 Tata cara Pelaksanaan PPN Ditanggung Pemerintah.

#### 1. Untuk Penyerahan (Pengadaan/Pembelian) BKP tertentu :

- a. PT. Kereta Api (Persero) dalam hal ini adalah pejabat pemegang otorisator atau penandatanganan kontrak, selaku pembeli BKP tertentu harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, dengan di lampiri :
  1. Foto copy kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli.
  2. Dokumen yang berkenaan dengan perusahaan angkutan Kererta Api Nasional.
- b. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (SKB PPN) atas penyerahan (pengadaan/pembelian) BKP tertentu di terbitkan oleh kepala KPP atas nama Direktur Jendral Pajak dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  1. Lembar ke-1 : untuk PKP yang menyerahkan BKP tertentu melalui PKP pembeli/PT. Kereta Api.
  2. Lembar ke-2 : untuk KPP di mana PKP penjual BKP (rekanan) terdaftar.
  3. Lembar ke-3 : untuk KPP yang menerima penyerahan BKP/PT. Kereta Api.
  4. Lembar ke-4 : untuk arsip KPP di mana KPP pembeli terdaftar.
- c. PKP penjual (rekanan) setelah menerima Surat Keterangan PPN Dibebaskan lembar ke-1, wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap-3 dan harus membubuhkan "*PPN Dibebaskan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor :146 tahun 2000*" serta mencantumkan nomor dan tanggal Surat Keterangan PPN Dibebaskan pada setiap lembar Faktur Pajak di maksud. Distribusi setiap lembar Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
  1. Lembar ke-1 : untuk PKP pembeli/PT. Kereta Api.
  2. Lembar ke-2 : untuk KPP di mana PKP penjual (rekanan) terdaftar.
  3. Lembar ke-3 : untuk PKP penjual (rekanan).



- d. PT. Kereta Api dalam hal ini adalah pejabat Pengesah Pembayaran (PP) sebagai pembuat laporan pembelian BKP wajib menyampaikan laporan PPN Dibebaskan melalui SPT Masa PPN, dalam formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan).
2. Untuk Penyerahan Jasa Perawatan atau Reparasi Kereta Api yang diterima oleh PT. Kereta Api (persero) :
    - a. Dalam penagihan biaya pekerjaan jasa, PKP yang menyerahkan jasa (rekanan) wajib membuat Faktur Pajak dalam rangkap-3, dan membubuhkan cap “PPN Dibebaskan sesuai Pemerintah Nomor :146 tahun 2000” pada setiap lembar Faktur Pajak dengan peruntukkan sebagai berikut :
      1. Lembar ke-1 : untuk PT. Kereta Api (persero), selaku penerima JKP.
      2. Lembar ke-2 : untuk KPP tempat PKP yang menyerahkan JKP terdaftar (sebagai lampiran SPT Masa PPN).
      3. Lembar ke-3 : untuk arsip PKP yang menyerahkan JKP (rekanan).
    - b. PT. Kereta Api (persero) sebagai PKP yang menerima penyerahan JKP tidak perlu mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN.
    - c. PT. Kereta Api (persero) dalam hal ini adalah pejabat Pengesah Pembayaran (PP) sebagai pembuat laporan pengadaan JKP wajib menyampaikan laporan PPN Dibebaskan melalui SPT Masa PPN, dalam formulir 1195 B4 (Daftar Pajak Masukan yang tidak dapat Dikreditkan).

Setelah tata cara pengenaan PPN Dibebaskan sudah di laksanakan dengan baik kemudian perusahaan kereta api merekapnya setiap bulan yang nanti akan di laporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pusat di Bandung setiap bulannya. Berikut ini daftar pengenaan PPN Dibebaskan pada PT. Kereta Api (persero) DAOP IX Jember selama tahun 2000 :

Daftar PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Ditanggung  
Pemerintah Tahun 2000 Pada  
PT KA Daop IX Jember

TABEL II

No.	Jenis Pekerjaan	Bulan - Bulan												JUMLAH			
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember				
I	Unluk: Jasa Perawatan Kereta Api																
a	Cuci Kereta	672.800	1.380.350	64.900	718.200	1.059.727	841.545	1.123.500	675.863	720.273	628.182	579.545	1.220.136	9.685.024			
b	Perbaikan Kereta	-	1.143.760	1.210.760	3.621.300	-	2.026.170	2.504.855	1.871.296	5.555.091	694.665	2.103.836	523.645	21.335.380			
c	Overhaul Mesin	-	-	-	-	2.132.250	1.151.636	3.830.132	-	-	-	-	-	7.114.018			
d	Pengecatan Kereta	-	-	-	-	-	655.909	-	-	-	-	-	-	6.614.032			
e	Membuat stelan Rem	-	-	-	-	-	240.948	-	-	-	-	-	-	240.948			
f	Pembuatan Bush Copling	-	-	-	-	-	-	-	97.509	-	-	-	-	97.509			
	Unluk: lokomotif																
II	Unluk Penyerahan BKP																
	Tententu:																
a	Pengadaan barang Persediaan Unluk Kereta	-	-	-	-	-	4.484.641	4.484.641	-	8.915.136	-	3.318.353	8.382.000	29.584.771			
b	Pengadaan barang Persediaan Unluk Gerbong	-	-	-	-	-	2.248.727	2.248.727	-	2.868.773	-	1.625.250	-	8.991.477			
c	Pengadaan barang Persediaan Unluk Lok	-	-	-	-	-	4.222.636	4.222.636	39.081.818	8.961.446	-	4.429.773	3.429.545	64.367.854			
d	Pengadaan barang Persediaan banjalain kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.102.273	27.128.808	31.231.081			
Jumlah PPN DTP selama tahun 2000																	
479.262.094																	

Sumber data : Bagian Keuangan P.T Kereta Api Daop IX Jember



Dari tabel diketahui bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah selama tahun 2000 adalah sebesar Rp 179.262.094. Adapun jenis pekerjaannya terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Pekerjaan untuk jasa perawatan kereta api. Pekerjaan perawatan kereta api ini meliputi: cuci kereta, perbaikan kereta, "overhaul" mesin, pengecatan kereta, membuat "stelan rem" dan pembuatan "bush cupling" untuk lokomotif. Pencucian kereta setiap bulan pasti ada sehingga selama tahun 2000 biaya pencucian kereta sebesar Rp 9.685.024. Mengenai perbaikan kereta setiap bulan belum tentu ada, karena setiap bulan kereta belum tentu rusak dan belum tentu memerlukan perbaikan. Tahun 2000 perbaikan kereta terjadi pada bulan Januari dan Mei. Selama tahun 2000 pengecatan kereta terjadi tiga kali yaitu pada bulan Juni, November dan Desember. Pada tahun 2000 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah yang paling besar untuk jasa perawatan kereta api adalah pada perbaikan kereta yaitu sebesar Rp 21.335.380.
2. Pekerjaan untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu. Pekerjaan ini meliputi: pengadaan barang persediaan untuk kereta, untuk gerbong, untuk lokomotif dan pengadaan bantalan kayu. Pengadaan barang untuk kereta selama tahun 2000 terjadi lima kali yaitu pada bulan Juni, Juli, September, November dan Desember sebesar Rp 29.584.771. Berbagai pengadaan barang yaitu pengadaan barang untuk lokomotif paling banyak terjadi, yaitu terjadi enam kali pada bulan Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember, sedangkan untuk pengadaan bantalan kayu terjadi dua kali pada bulan November dan Desember. Dari data tersebut terlihat bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah yang paling banyak adalah untuk pengadaan barang persediaan kereta yaitu sebesar Rp 64.367.854.

### **3.2 Penilaian Terhadap Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi (Daop) IX Jember merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan usaha pelayanan jasa angkutan kereta api dalam rangka



memperlancar arus perpindahan orang dan barang secara masal. Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perusahaan kereta api tentunya tidak terlepas dari motivasi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Berdasarkan Surat Edaran dari Direktur Jenderal (DIRJEN) Pajak, perusahaan Kereta Api sebagai Wajib Pajak juga sebagai Pemungut Pajak. Menurut Mardiasmo (1997:1) dalam bukunya berjudul Perpajakan menyatakan bahwa pengertian pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang tidak dapat di paksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat di tunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum . Berdasarkan Surat Edaran tersebut maka perusahaan Kereta Api harus melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. PT.Kereta Api sebagai wajib pajak wajib menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT tahunan maupun SPT masa dan memasukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan serta menyelenggarakan pembukuan ataupun pencatatan yang di perlukan.

Perusahaan Kereta Api melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan asas "self assesmant" yaitu menghitung, menyetor, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan jumlah pajak yang sebenarnya terutang, perusahaan Kerata Api menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPTMasa maupun SPT Tahunan. Untuk pelaporan tentang jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Ditanggung Pemerintah (DTP) perusahaan kereta api menggunakan SPT Masa PPN.Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah pada PT. Kereta Api DAOP IX Jember telah melaksanakan prosedurnya dengan baik mulai dari membuat surat permohonan PPN DTP, menghitung PPN DTP dan melaporkan PPN DTP tersebut setiap bulannya, yang semua itu telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib.

## IV. PENUTUP

Dengan rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat, taufik dan hisayahNya, sehingga dapat menyelesaikan laporan ini. Tak lupa diucapkan terima kasih pada para staf, dosen dan karyawan di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan kepada Kantor PT. Kereta Api Daerah Operasi (DAOP) IX Jember yang telah bersedia menerima untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN). Ucapan terima kasih kepada teman-teman dan kerabat lain yang telah memberikan dorongan, bantuan serta doa yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, sehingga dapat menyelesaikan laporan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) khususnya untuk Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Mardiasmo, 1996. Perpajakan, Edisi 3, Yogyakarta, Andi Offset.
2. Tim Universitas Jember, 1998, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jember.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia NO. 37 tahun 1998 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan BKP dan JKP tertentu yang di tanggung pemerintah.
4. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. 48/PJ/2001 tentang tata cara pemberian dan penata usahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas impor dan atau penyerahan BKP atau JPK tertentu.
5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 10/KMK.04/2001 tentang pemberian dan penata usahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan atas impor dan atau penyerahan BKP atau JKP.





Surat Tugas


Nomer : 548 / J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menunjukan nama-nama dibawah ini :

No	Nama	NIM	Keterangan
01	Susilo Prastyo S.	98 - 1054	Ketua
02	Seiasl P.	98 - 1030	Wakil Ketua
03	Fetty R.	98 - 1040	Anggota

Untuk mengikuti Program Magang di PT KI. DAOP IX Jember selama 1 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan samapai dengan selesai. Selama melaksanakan kegiatan magang diwajibkan mengikuti tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku di tempat Magang.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jember,  
Dekan,  
  
DEK. H. MOCH. TOFRKI

NIP. 130 524 832



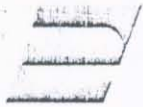
**PT. KERETA API (Persero)**  
DAERAH OPERASI IX JEMBER

**DAFTAR ABSENSI PKN  
PADA PT. KERETA API  
DAERAH OPERASI IX JEMBER**

No.	Tanggal	Jam	Tanda Tangan
1.	6 Maret 2001	07.00 - 12.00	1. <i>[Signature]</i>
2.	7 Maret 2001	07.00 - 12.00	2. <i>[Signature]</i>
3.	8 Maret 2001	07.00 - 12.00	3. <i>[Signature]</i>
4.	9 Maret 2001	07.00 - 12.00	4. <i>[Signature]</i>
5.	10 Maret 2001	Libur	5. —
6.	11 Maret 2001	Libur	6. —
7.	12 Maret 2001	07.00 - 12.00	7. <i>[Signature]</i>
8.	13 Maret 2001	07.00 - 12.00	8. <i>[Signature]</i>
9.	14 Maret 2001	07.00 - 12.00	9. <i>[Signature]</i>
10.	15 Maret 2001	07.00 - 12.00	10. <i>[Signature]</i>
11.	16 Maret 2001	07.00 - 12.00	11. <i>[Signature]</i>
12.	17 Maret 2001	Libur	12. —
13.	18 Maret 2001	Libur	13. —
14.	19 Maret 2001	07.00 - 12.00	14. <i>[Signature]</i>
15.	20 Maret 2001	07.00 - 12.00	15. <i>[Signature]</i>
16.	21 Maret 2001	07.00 - 12.00	16. <i>[Signature]</i>
17.	22 Maret 2001	07.00 - 12.00	17. <i>[Signature]</i>
18.	23 Maret 2001	07.00 - 12.00	18. <i>[Signature]</i>
19.	24 Maret 2001	Libur	19. —
20.	25 Maret 2001	Libur	20. —
21.	26 Maret 2001	Libur	21. —
22.	27 Maret 2001	07.00 - 12.00	22. <i>[Signature]</i>
23.	28 Maret 2001	07.00 - 12.00	23. <i>[Signature]</i>
24.	29 Maret 2001	07.00 - 12.00	24. <i>[Signature]</i>
25.	30 Maret 2001	07.00 - 12.00	25. <i>[Signature]</i>
26.	31 Maret 2001	Libur	26. —
27.	1 April 2001	Libur	27. —
28.	2 April 2001	07.00 - 12.00	28. <i>[Signature]</i>
29.	3 April 2001	07.00 - 12.00	29. <i>[Signature]</i>
30.	4 April 2001	07.00 - 12.00	30. <i>[Signature]</i>
31.	5 April 2001	07.00 - 12.00	31. <i>[Signature]</i>
32.	6 April 2001	07.00 - 12.00	32. <i>[Signature]</i>

Mengetahui

**SUKARNO**  
NIPP. 36360



**PT. KERETA API (Persero)**  
DAERAH OPERASI IX JEMBER

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Aruwan  
NIPP : 21916  
Jabatan : Kepala Urusan Keuangan PT. Kereta Api  
Daerah Operasi IX Jember

Memberitahukan dengan sebenarnya bahwa Mahasiswa DIII Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang bernama :

Nama : Fety Rahmatika  
NIM : 980903101040  
Fakultas : ISIP DIII Perpajakan  
Universitas Negeri Jember


Telah melaksanakan Praktek Kerja Nyata ( PKN ) mulai tanggal 6 Maret 2001 s/d 6 April 2001.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jember, 6 Maret 2001  
Kepala Urusan Keuangan

Drs. Aruwan  
NIPP. 21916




No. Faktur Penjualan/ Kontrak/Order *) :	<b>FAKTUR PAJAK STANDAR</b>	Nomor Seri : <b>000406</b> DEJCH - 626		
<b>PENGUSAHA KENA PAJAK :</b>				
Nama :	C.V. BUDI YASA			
Alamat :	Jln. Sumber Alam D. 5 Jember			
N P W P :	1 447 375 5 626			
No. Pengukuhan PKP :	No. 887.PKP/WPJ.06/KI.1912/86	Tanggal : 16 Desember 1986		
Tanggal Penyerahan/Pembayaran *) :		1986 12 3		
<b>PEMBELI BKP/PENERIMA JKP :</b>				
Nama :	PT. Kerota Api (Persero)			
Alamat :	Jl. Dahlia no. 2 Jember			
N P W P :	1 000 016 4 626			
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum	Harga Satuan (Rp)	Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp)
	Pengecatan dinding luar/ dalam kereta dan Perbaikan interior instalasi air kuman kecil dan instalasi listrik			48.196.500,-
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>* PPN DIBEBAHKAN SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000 *</b></p> </div>				
Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)				48.196.500,-
Dikurangi potongan harga				
Dikurangi uang muka yang telah diterima				
Dasar Pengenaan Pajak				43.815.000,-
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak				4.381.500,-
TARIF	DPP	PPn BM		
.....%	Rp. ....	RP. ....		
.....%	Rp. ....	RP. ....		
.....%	Rp. ....	RP. ....		
.....%	Rp. ....	RP. ....		
<b>TOTAL</b>		RP. ....		
Jember, 2 Maret ..... 2001  Nama Terang				

\*) Coret yang tidak perlu

## Lampiran 5

Lembar ke 1 Untuk Pembeli BKP/Penerima JKP  
sebagai bukti pajak Masukan

No. Faktur Penjualan / Kontrak / Order * )		<b>FAKTUR PAJAK STANDAR</b>		Nomor Seri : DNTXK-626-140 000216																						
<b>PENGUSAHA KENA PAJAK</b>																										
N a m a		: CV. DEWI SRI																								
A l a m a t		: Jl. Let. Jen Suprpto XII/33 Jember																								
N.P.W.P.		: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">8</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td></tr></table>				1	6	1	2	8	6	8	8	6	2	6										
1	6	1	2	8	6	8	8	6	2	6																
No. Pengukuhan PKP		: No. PKP. 626.01397.09.94				Tanggal : 22 September 1994																				
Tgl. Penyerahan / Pembayaran * )																										
<b>PEMBELI BKP / PENERIMA JKP</b>																										
N a m a		: PT. Kerota Api (Persero)																								
A l a m a t		: Jl. Dahlia no. 2 Jember																								
N.P.W.P.		: <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">4</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td><td style="width: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; text-align: center;">6</td></tr></table>				1	0	0	0	0	1	6	4	6	2	6										
1	0	0	0	0	1	6	4	6	2	6																
No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Kwantum	Harga Satuan ( Rp )	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka/Termijn ( Rp )																						
	Pengadaan Bantalan Kayu Kelas I Kv. A. uk. 13x25x200			14.440.000,-																						
* TIDAK DIBEBASTAN SESUAI PP. NOMOR 146 TAHUN 2000 NO: KET. 236 / U.P.J. 09 / K.P. 170 / 2001 TGL. 13 Maret 2001																										
Jumlah Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termijn * )				14.440.000,-																						
Dikurangi potongan harga																										
Dikurangi uang muka yang telah diterima																										
Dasar Pengenaan Pajak				13.127.273,-																						
PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak				1.312.727,-																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">TARIF</th> <th style="width: 20%;">DPP</th> <th style="width: 20%;">PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>..... % Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td></tr> <tr><td>..... % Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td></tr> <tr><td>..... % Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td></tr> <tr><td>..... % Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td></tr> <tr><td>..... % Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td><td>..... Rp. ....</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td>..... Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table>		TARIF	DPP	PPn BM	..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....	..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....	..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....	..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....	..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....	<b>Total</b>		..... Rp. ....	Jember ..... Tel 14 Maret 2001 ..... 19 ..... <div style="text-align: center;">  <p><b>PT. DEWI SRI</b>                      JL. LET. JEN. SUPRPTO XII No. 33                      JEMBER                      ( MUHAMAD ALI )</p> </div>			
TARIF	DPP	PPn BM																								
..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....																								
..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....																								
..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....																								
..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....																								
..... % Rp. ....	..... Rp. ....	..... Rp. ....																								
<b>Total</b>		..... Rp. ....																								

\* ) Coret yang tidak perlu



Lampiran 6

LEMBAR

1



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : <input type="text" value="1"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> - <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="8"/> - <input type="text" value="8"/> - <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="6"/> <small>diisi sesuai kartu NPWP</small>	
Nama WP : CV.Dewi Sri	
Alamat WP : Jl. Let Jen Suprpto XII/33 Jember	
Kode Pos <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Uraian Pembayaran *) PPN 10%	
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>	
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT	Tahun
<small>Ben tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>	
Jan <input type="checkbox"/> Feb <input type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Apr <input type="checkbox"/> Mei <input type="checkbox"/> Jun <input type="checkbox"/> Jul <input type="checkbox"/> Ags <input type="checkbox"/> Sep <input type="checkbox"/> Okt <input type="checkbox"/> Nov <input type="checkbox"/> Des <input type="checkbox"/>	<small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/>
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>	
Nomor Ketetapan : <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> / <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>	
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>	
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp. 4.948.636,-	Terbilang : Empat juta sembilan ratus empat puluh delapan - ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah.
<small>Diisi dengan huruf</small>	
Ruang Teraan <small>Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN</small>	
Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal ..... <small>Cap dan tanda tangan</small>	Wajib Pajak/Penyetor ....., tgl. .... <small>Cap dan tanda tangan</small>
Nama Jelas : .....	Nama Jelas : .....

\*) Diisi uraian pembayaran, sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.





DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK**

**( S S P )**

Untuk KPP melalui KPN

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. Dewi Sri

Alamat WP : Jl. Let. Jand. Suprpto. XIII/33. Jember.

Kode Pos

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran (MAP)

*Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Uraian Pembayaran \*)

PPN 10%

Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

*Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan*

Tahun

*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Jan Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des

*Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran  
*Diisi dengan pembayaran rupiah penuh*

Rp. 4.948.636,-

Terbilang :

*Diisi dengan huruf*

Empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah.

Ruang Teraan

*Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....

*Cap dan tanda tangan*

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl. ....

*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

*\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Tambahan Informasi :*

- Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk dilaporkan  
oleh WP ke KPP

**NPWP** :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

**Nama WP** : CV. Dewi Sri

**Alamat WP** : Jl. Let Jend Suprpto XIII/33 Jember.

Kode Pos

<b>Kode Jenis Pajak (MAP)</b>	<b>Kode Jenis Setoran</b>	<b>Uraian Pembayaran *)</b>
<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	PPN 10%
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>		

<b>Setoran</b> : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT											<b>Tahun</b>	
<i>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</i>											<i>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</i>	
Jan	Peb	<del>Mar</del>	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
<i>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</i>												

**Nomor Ketetapan** :  /  /  /  /

*Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

<b>Jumlah Pembayaran</b> <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	<b>Terbilang</b> : Empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah. <i>Diisi dengan huruf</i>
Rp. 4.948.636,-	

**Ruang Teraan**  
*Ditara oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

<b>Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro</b> Tanggal ..... <i>Cap dan tanda tangan</i>	<b>Wajib Pajak/Penyetor</b> ....., tgl. .... <i>Cap dan tanda tangan</i>
<b>Nama Jelas</b> : .....	<b>Nama Jelas</b> : .....

\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
 Tambahan Informasi :  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



Lampiran 9

LEMBAR **4**



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK  
(S S P)**

Untuk Bank, Persepsi/  
Kantor Pos & Giro

NPWP :  -    -    -  -    *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : CV. Dewi Sri

Alamat WP : Jl. Let Jend Suprpto XIII/33 Jember.

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)     Kode Jenis Setoran

PPN 10%

Uraian Pembayaran \*)

*isi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1*

Jenis Setoran :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

Tahun

*isi tanda silang pada kolom yang berkenaan*

*Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud*

Bulan :  Jan  Feb  Mar  Apr  Mei  Jun  Jul  Ags  Sep  Okt  Nov  Des

*isi tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan*

Nomor Ketetapan :  /  /  /

*isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT*

Jumlah Pembayaran  
*isi dengan pembayaran rupiah penuh*

Terbilang : Empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah.

4.948.636,-

Tanda Tangan  
*isi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN*

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....  
*Cap dan tanda tangan*

Wajib Pajak/Penyetor  
....., tgl. ....  
*Cap dan tanda tangan*

Nama Jelas : .....

Nama Jelas : .....

*isi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :*

*Perubahan Informasi :*

*Khusus PPh Final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.*

*Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.*



DEPARTEMEN KEUANGAN RI.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK

## SURAT SETORAN PAJAK (S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut  
atau pihak lain

**NPWP** : 1 - 612 - 868 - 8 - 626 diisi sesuai kartu NPWP

**Nama WP** : CV. Dewi Sri

**Alamat WP** : Jl. Let Jend Suprpto XIII/33 Jember.

Kode Pos      

<b>Kode Jenis Pajak (MAP)</b>	<b>Kode Jenis Setoran</b>	<b>Uraian Pembayaran *</b>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	PPN 10%
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>		

**Setoran** :  Masa  Tahunan  Final  STP  SKPKB  SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	<b>Mar</b>	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<b>Tahun</b>
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>												<small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small>
												<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>

**Nomor Ketetapan** :      /     /     /     /   

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

<b>Jumlah Pembayaran</b>	<b>Terbilang</b>
<small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small>	<small>Diisi dengan huruf</small>
Rp. 4.948.636,-	Empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah.

**Ruang Teraan**

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro  
Tanggal .....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Wajib Pajak/Penyetor  
....., tgl. ....

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : .....

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
**Tambahan Informasi :**  
 - Khusus PPh Final atas transaksi pergalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.  
 - Khusus PPh Final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.





**PT. KERETA API (Persero)**  
DAERAH OPERASI IX JEMBER

Nomer : 23/JJ/D.IX/II/2001  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan surat  
keterangan Ppn. di  
bebaskan atas perolehan  
barang kena pajak tertentu.

Jember, Tgl. 21 Februari 2001

Kepada :

Yth. Kantor Pelajanan Pajak  
Jl. Wahid Hasyim  
di  
J e m b e r

1. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomer 10/KMK.04/2001, tanggal 12 Januari 2001 dengan ini kami :

- Nama Perusahaan Kena Pajak : PT. KA ( Persero )
- Alamat : Jl. Dahlia 2 Jember
- N.P.W.P : 1.000.016.4-626

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, mohon untuk diberikan surat keterangan Ppn. Dibebaskan, guna perolehan Barang Kena Pajak tertentu seperti daftar terlampir.
3. Demikian atas kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Kepala Seksi  
Jalan rel & Jembatan  
Daop IX Jember

Ir. Andi Husein Makkah  
Nipp. 37243



Lampiran 12

DAFTAR LAMPIRAN SURAT NO 23/UNDI/XII/2001, Tgl 21 Februari 2001

No	Jenis barang dan jasa	Kuantitas	Harga Judi (Rp)	Pembelian Eksklusif (Rp)	Notaris / Tanggal Kantor Kas/Sebel	Barang Nama Paket Manda Pemasokan /alamat	RFIP
1	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	100 Btg	15.200.000	1.381.810	D.983/12/TW.IV-D/DIR/2001 10-01-2001	CV. DEWI SRI Jember	1.612.868.8-626
2	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x35x240cm Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	22 Btg 89 Btg	5.060.000 8.453.000	460.000 768.636	98 / SPK / JJ / XII / 2000 22 Desember 2000	CV. DEWI SRI Jember	1.612.868.8-626
3	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 22x24x200cm	100 Btg	24.200.000	2.200.000	02 / SPK / JJ / II / 2001 19 Februari 2001	CV. DEWI SRI Jember	1.612.868.8-626
4	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	400 Btg	46.200.000	4.200.000	03 / SPK / JJ / II / 2001 12 Februari 2001	CV. DEWI SRI Jember	1.612.868.8-626
5	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	400 Btg	46.200.000	4.200.000	05 / SPK / JJ / II / 2001 12 Februari 2001	CV. DEWI SRI Jember	1.612.868.8-626
6	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	400 Btg	46.200.000	4.200.000	06 / SPK / JJ / II / 2001 12 Februari 2001	CV. SBR. REJEKI Jember	1.613.065.0-626
7	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	400 Btg	46.200.000	4.200.000	07 / SPK / JJ / II / 2001 12 Februari 2001	CV. PINDA BHASKARA Jember	1.617.469.2-626
8	Batrakan kayu ritin la kelas I Kw. A rit. 13x22x200cm	400 Btg	46.200.000	4.200.000	08 / SPK / JJ / II / 2001 12 Februari 2001	CV. PINDA BHASKARA Jember	1.617.469.2-626
				25.810.455			

No	Jenis barang/kegiatan	Kuantitas	Harga per kg	Penyusutan Rp	Nilai Rp	Nilai / Tanggal Kontak Kontak	Barang/Keperluan Pembelian Kategori	Nilai Rp
9.	Barelolan kayu rataan kelas I Kw. A rd. 13x22,200cm	400 Brg	46.200,000	25.810,455	4.200,000	13 / SPK / JJ / II / 2001 20 Februari 2001	CV. HADJI MUTHY A DIANA Banyuwangi	1.829.706,0-027
				30.010,455				

Jember, Tgl. 21 - 2 - 2001  
Kasi/JJ Drop IX Jr



Ir. Andi Hirsain Makhleh  
Nipp. 37243



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK JEMBER

Lembar 1 : untuk Pabrikan/Pengusaha  
 yang Menyerahkan Barang Kena Pajak

**SURAT KETERANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
 DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PEROLEHAN  
 BARANG KENA PAJAK TERTENTU  
 Nomor : KET-236 /WPJ.09/KP.1707/2001**

Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Pengusaha Kena Pajak : FT. KERETA API (Persero) DAERAH OPERASI IX JEMBER  
 Alamat : Jl. Dahlia No.2 Jember  
 NPWP : 1.000.016.4-626

Sesuai dengan permohonan tanggal 21 Februari 2001 dan diterima tanggal 9 Maret 2001  
 Nomor : 23/JJ/D.IX/II/2001 maka atas perolehan Barang Kena Pajak tertentu dibawah ini :

NO	NAMA BARANG DAN NOMOR SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN	KUANTUM	HARGA JUAL (Rp.)	PPN YANG TERUTANG	KETERANGAN
1.	Pengadaan bantalan kayu rimba klas I Kw.a Uk. 13x22x200 cm	160 Btg	15.200.000	1.381.819	Sesuai dengan Lampiran III Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 10/KMK.04/2001 Tanggal 12 Januari 2001
<b>JUMLAH</b>			15.200.000	1.381.819	

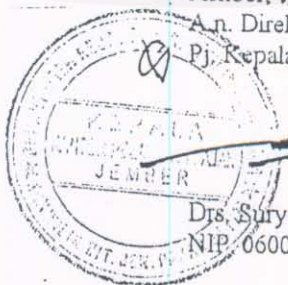
Nomor : D.9/JJ/027/TW.IV-D.IX.JR/2001 tanggal 10 Januari 2001

Pajak Pertambahan Nilai-nya ditanggung oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KMK.04/2001 tanggal 12 Januari 2001

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada :

Nama Pengusaha Kena Pajak : CV. DEWI SRI  
 Alamat : Jl. Letjend Suprpto XII/33 Jember  
 NPWF : 1.612.868.8-626

Jember, 13 Maret 2001  
 A.n. Direktur Jenderal Pajak  
 Pj. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jember



Drs. Suryadi, MM  
 NIP. 060049793





DIUANGKAN / DIBAYAR DENGAN CEK/ BILYET GIRO *) TGL _____ NO _____ BENDAHARAWAN _____  NIPP _____	<b>BUKTI PEMBAYARAN</b>	NOMOR: 1786/03/2001 - 32  1. Penguangan paling lambat 30 hari setelah pengesahan, jika melampaui harap dikembalikan ke PP-/ PPP ybs. 2. Lembar biru tidak untuk diuangkan
---	-------------------------	--

BENDAHARAWAN KAS : STASIUN \*) JEMBER DSL JEMBER  
BESAR/KANTOR PUSAT

HENDAKLAH MEMBAYAR / MEMINDAH BUKUKAN \*) KEPADA CV.DEWI SRI NIPP: 8  
 ALAMAT JL.LETJEN.SUPRPTO XII/33 JR  
 NO REK GIRO : 030.001081740.001 pada BANK BNI JR

UANG SEJUMLAH : RP. 61,274,443.00 DENGAN HURUF (ENAM PULUH SATU JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA RUPIAH)

KEPERLUAN : Beaya memperbaiki sepur simpang dan melengkapi wesel di SSP.PT.Pusri empl Kalibagor Pemb ke.I 95%

SOP NO :  
 SPD Nomor  
 2000/221000/213/XI/2000

SIP Nomor  
 2000/410000/0281/12/2000

SPU Nomor 432/D.IX/03/2001

TGL: 15/03/2000  
 Tanggal  
 / /  
 / /  
 / /  
 / /

Tanggal  
 26/12/2000  
 / /  
 / /  
 / /

TGL: 15/03/2000

CATATAN:

JEMBER Tgl. 15 Maret 2001

PENGESAH PEMBAYARAN

PEMBANTU PENGESAH PEMBAYARAN- \*)

*(Signature)*  
 DEDDY GUNARDI

NIPP 18777

KODE PERKIRAAN DEBET	NILAI RUPIAH
2901 /-----/ 2011 /-----/ /-----/ /-----/ /-----/	61.274.443.00
<b>J U M L A H</b>	61.274.443.00
KODE PERKIRAAN KREDIT	NILAI RUPIAH
2910 /-----/1051	61.274.443.00

Telah diterima Tgl' _____	Pembuat, <i>(Signature)</i> HERIYATI NIPP. 29325
------------------------------	---

A 9 \*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN

Lampiran 17 Lampiran III

Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : 329 /KMK.04/1999

Tanggal : 18 Juni 1999

DAFTAR SUKU CADANG PERALATAN  
UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA KERETA API

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
I	SARANA KERETA API	
1.	MESIN : LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL, PEMBANGKIT LISTRIK.	<p>a. Mekanis Engine :</p> <p>Main Frame Assembly, Crank Case Assembly, Gear Case Assembly, Cover Front End, Cover Crank Case Inspection, Dipstick Assembly, Metal Mesh/Oil Charge/Main Bearing, Camshaft Gear Drive, Camshaft Assembly, Bearing Pin, Crank Shaft Assembly, Timing Gear, Balance Shaft/Idler Shaft &amp; Gears, Cylinder Liner Assembly, Connecting Rod Assembly, Piston Assembly, Cover Wilo, Hub, Jacking Ring, Pump/Gear &amp; Mouning, Lube Oil, Breather, Cylinder Head, Prechamber, Rocker Support, Valve, Governor Assy, Over Speed Governor, V-Belt, Ring, Seal, Screen, Sleeve, DCA liquid, Gasket, Test Kit, Stinger, Collar, Hose, Turbo Super Charger.</p> <p>b. Air Intake System :</p> <p>Air Inlet, Air Cleaner, Air Filter, Turbo Super Charger, Air Piping &amp; Fiting, Air Intake Manifold, Exhaust Manifold, Stack .</p> <p>c. Cooling System :</p> <p>Cooler Drive With Cooling Plat, Voith Cooling, Unit, Cooler Joint, Variable Speed Fan With Impeller, Water Tank, Water Inlet Header, Discharge Header, Piping, Radiator, Fan Drive, Cooler &amp; Mounting, Water Pump, Air Cooler, Shutter, Regulaung Valve Assy, Water Treatment, Bevel Gear Assy, Temperature Control For Cooling Water .</p> <p>d. Fuel System :</p> <p>Fuel Tank Arrangement, Fuel Tank, Fuel Strainer, Fuel Injection Pump, Fuel Nozzle Assy, Fuel Piping &amp; Fiting, Fuel Pump With DC Motor, Fuel Filter Assy, Pre Fuel Tank.</p> <p>e. Lube Oil System :</p> <p>Lube Oil Assy, Lube Oil Filter/Element, Lube Oil Cooler, Lube Oil Pipe System, Preliminary Lubrication Pump Assy, Oil Pump, Relay Valve, Oil Pressure Switch, Low Oil Switch.</p>
2.	SISTIM KONTROL : LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, PEMBANGKIT LISTRIK.	Resistor Dynamic Brake, Thyristor Regulator Assy, Relay Contactor, Interlock, Magnet Switch Reverser, Control Group, Compartment with Doors and Covers, Panel, Terminal Board, Voltage Regulator, Circuit Breaker, Dead Man Pedal System, Motor Start, Pressure Switch, Throttle Valve , Pantograph, GTO Inverter.





MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
3.	SISTIM TRANSMISI LISTRIK : LOKOMOTIF, KERETA REL LISTRIK	a. Traction, Exciter, Aux. Generator : Field Coils, Armature, Gear Case, Brush Holder & Carbon Brush, Power Take Off Gear Unit, Bearing, Auxiliaries .  b. Traction Motor : Housing, Field Coils, Armature, Gear Box, Brush Holder & Carbon Brush, Bearing, Duct TM, Motor Suspension, Accessories TM, Starting Motor Assy., Armature Shaft, Pinion & Draft Gear, Rewinding Kit, Traction Motor Assy.
4.	SISTIM TRANSMISI HIDROLIK LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL	a. Turbo Transmission : Housing Assy., Filter Pump., Main Control, Output Drive, Reversing Valve, Step Up Gear, Gear Wheels, Cover, Rotor Uniform Part, Input & Output Drive Part, Intermediate Shaft, Selector Parts, Selection Seavenger Pump, Transmission Suspension, Electric Instrument, Pressure Switch .  b. Gardan Shaft Assy. : Gardan Shaft, Joint Coupling .
5.	SISTIM Pengereman : LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG	a. Air Brake System : Air Compressor and Spare Parts, Check Valve, Angle Cock, Hose Connection & Pipe, Air Reservoir, Drain Cock & Stop Cock, Valve Parts, Brake Coupling, Cylinder, Automatic Drivers, Brake, Double Check Valve With Rubber Packing, Charge Over Cock, Charging Cut Off Pilot, Regulating Cylinder, Test Ventel, Bell/Horn, Window Wipper Arrangement, Brake Shoe, Distributor Valve Assy., Slang Air Brake, Slack Adjuster, Emergency Brake, Inner Parts Distributor Valve .  b. Hand Brake And Brake Mechanism : Rigging, Hand Brake Lever, Sand Blaser .
6.	BOGI LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG	a. Bogie Assembly  b. Wheel and Axle Assembly : Combined/Wheel Set, Axle, Drive Gear, Journal Bearing, Bearing, Axle Box .  c. Journal Box and Spring Assembly  d. Swing Bolster Assembly : Center Plate Assembly & Center Pl, Upper and Lower Swing Bolster Assenbly, Spring Assembly, Vertical & Horizontal Oil Damper, Snubber, Conical Rubber Bounded, Pegas Daun, Rubber Block, Air Spring, Disc. Brake, Brake Pad, Block Rem, T-Link, Colipper, Shock Absorber & Kit, Antimonium & Banka Tin, Pin, & Brush, Kawat Las Roda, Wear Plate, Tas Pot, King Pen, Swingen Pendel, Rubber Journal Spring, Bahan Baja Pegas .



MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
7.	BODI LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG.	a. Under Frame and Platform : Car Body to Traction Motor, Cable Connector, Coupler Arrangement, Power Plant Mounting, Uncoupling Lever Arrangement, Cable Clamps Steel, Train Line Jumper & Receptable, Platform Signal Light Arrangement, Side Steps & Hand Rail, Way Side & Battery Receptable .  b. Nose Cab Assembly, Roof Flap to Engine  c. Operators Cab Assembly : Operators Cab, Accessories, Arrangement, Control Console, Engine Gauge Panel, Sliding Window, Window Wing, Dome Light Arrangement, Doors Latch Control Arrangement, Switch Sander & Dead Man, Engine Cab, Blower Unit, Signal Middle Front & Rear .  d. Lantai : Pelat Baja Gelombang, Unitek, .  e. Exterior : Bingkai Jendela, Kaca Jendela, Pelat Baja, Pintu, Kunci-Kunci, Pelat Baja Keimbang, Baja Kanal, Pipa Baja, . Cat, Rubber Bellow .  f. Accessories Interior : Kursi, Plat Alumunium, Rak Barang, Lis Karet, Ceiling Fan, Exhaust Fan, Melamine Plastic Hard Board .  g. Module Lavatory : Module Floor Stainless Steel, Module GFRP.
8.	ALAT PERANGKAT OTOMATIS LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG.	Automatic Coupler Assy, Coupler Body, Knuckle, Rubber Draft Gear .
9.	ALAT BANTU LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA, GERBONG	a. Safety Auxiliary : Fire Extinghuiser, Day Light Signal Arrangement, Head Light Assy, Fire Signal Device with Fuse, Radio Locomotive, Water Treatment for Engine Cooling System .  b. Indicator Speed Auxiliary : Speedo Meter, Auxiliary of Electric Connection, Locomotive Cable & Wire, Terminal Connection, Fitting Parts  c. Battery & Kallilog  d. Coupler Electric, MCB, Matching, Cable.
10.	MESIN PENYEGAR UDARA LOKOMOTIF, KERETA REL DIESEL/LISTRIK, KERETA	Motor Compressors, Blower, Condensor, Thermostatic Expansion Valve, Filter Drier, Low & High Pressure Cut Out Switch, Discharge By Pass Valve, Contactor, Relay, Circuit Breaker .





MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
II.	PRASARANA KERETA API	
1.	SISTIM PERSINYALAN KERETA API :  a. SIGNAL DIESEL GENERATOR  b. POWER CUBICLE  c. SIGNAL POWER CUBICLE  d. BATTERY CHARGER  e. INVERTERS  f. PERALATAN TELEKOMUNIKASI UNTUK PERSINYALAN  g. PANEL (LOKAL & PUSAT)  h. RAK MODUL  i. VITAL PROCESSING INTERLOCKING (VPI) (PERSINYALAN SISTEM VPI)	Engine Controller, Voltage Regulator, Diesel Spare Part, Generator Spare Part .  Control Transformer, Contact Block, Phase Monitor, Circuit Breaker, Automatic Transfer Switch, Control Board, Disconnected Switch, Ammeter, Voltmeter, Fuses .  Fuses, Circuit Breaker, Aux. Contact, Transformer Relay, Relay Socket, DC Multi Voltmeter, DC/AC Voltmeter, AC Ammeter, Indication Lamp, Bypass Switch, Inverter, Battery Charger, Battery Bank .  Elec. Power Failure Switch, Electronic Control Board, DC Ammeter, DC Voltmeter, Fuses, Transistor Power Stage, Silicon Diode Output Bypass Assembly .  Electronic Control Board, Reverse Polarity Circuit Board, AC Voltmeter, Dual SCR Module, Power Block, Transistor Module Static Transfer Switch, Frequency Meter, Transformer .  Telephone Concentrator, Telephone Console, Signal Post Telephone, Level Crossing Telephone, Talk Back, Master Talk-back, Check Log, Spare Part, Modem Optical Fiber Spare Communications .  Control Panel / Work Station, Push Button, indicator, Key Switch, Tracker Ball, Mouse, Cover Plate, Minic Panel, Frame, Programmable Logic Controller, Indication Lamp .  Rack Mounting Spare, Relay, Relay Holder, Case & Frame, Inverter, Equalizer, Resistor, Power Supply, Transformer, Earthing/Lighting Protection Material .  VPI Housing, Input Board , Output Board, PD Board, CPU/PD Board, CSEX Board, DI Board, VRD Board, AC/DC Converter, Power Supply Vital / Non Vital, I O Bus, Hardness Wire, Plug Coupler, VPI Tester, Workstation, Hand Held Terminal .



MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	<p>j. WAYSIDE SPARE</p> <p>k. SIGNAL ANSALDO (PERSINYALAN SISTEM ANSALDO)</p> <p>l. SIGNAL SOLID STATE INTERLOCKING (SSI) (PERSINYALAN SISTEM SSI)</p> <p>m. WESTRACE INTERLOCKING (PERSINYALAN SISTEM WESTRACE)</p> <p>n. PERSINYALAN SISTEM VPI - DBRI</p> <p>o. SIGNAL MODULAR INTERLOCKING SYSTEM 801 (MIS 801)</p> <p>p. SINYAL MEKANIK</p>	<p>Point Machine, Rodding, Electric Lock, Point Detector, Impedancy Bond, Track Circuit, Axle Counter, Pulsat Transmitter, Pulsat Receiver, Wheel Detection, Axle Counter Evaluation, Axle Counter Master/Slave, Rail Insulation, Insulated Rail Joint, Rail Connector, Rail Connector Tools, Signal, Signal Lamps, Signal Lens, Level Crossing, Rail Tools.</p> <p>Genisys Control System, Relay P 150, Industrial Relay, Remote Switch Relay, Block System Equipment, Panel Control Spare Part, Genisys Workstation, Timer Control Card.</p> <p>Multi Processor Module, Panel processor Module, Data Link Module, Track Function Module, Multiplexer, Scanner, Technician Terminal, Data Link, Diagnostic Module, Surge Arrester, Lightning Protection, Safety Fuses, SSI-Tester, SSI Workstation /Software.</p> <p>Support Equipment, Consumable Spare, Compulsary Spares, Westrace Module, Telemetry Control System, Optical Fibre Spare, Communication, Level Crossing Control, Workstation, Earthing Material.</p> <p>Vital Link TEMPL-20 System, M.L. Audio frequency, Track Circuit T-21, Modem, TEMPL-41, Master Controller, Operator Control Unit, Transformer Power, DC/DC Converter, Panel Control Spare Part.</p> <p>Module Mis.801. Module Block System, Fuse Cartridge, Cover Plate, Optical Signal, Signal lens, Relay Signal DRS-60, Relay Signal K-50.</p> <p>Indicator Blok, Kawat Baja 4 mm, Kawat Baja 5 mm, Kontak Rel, Kunci Listrik, Roda Kawat, Tokenless Blok, Interlocking Spare Part, Perkakas Hendel, hendel, Sentil, Lengan Sinyal, Semat, Roda Wesel.</p>
2.	ALIRAN ATAS (OHC) (Khusus Kereta Rel Listrik /KRL)	<p>Lighting, Arrester, Steady Brace, Section Insulator, Half Section, Steady Arm, Synthetic, Hanger Insulator, Cross Clamp, Feed Ear, FRP, Disconnecting Switch, Suspension Insulator, Pole Band, Wire Clip, Compression Dead End Clamp, Dead End Fitting, Compression Terns, Sleeve, Compression Anchor Fitting, Compression Terminal, Connector Clamp, Double Ear, Hanger Ear, Hanger Bar, Wire Terminal, Automatic Tensioning Device, Wire Turbuckle, Full of fitting, Line Guard, Arching Horn, Copper Standed Wire, CV Cable, Cable Head, Trolley, Wire, Drum Jack, With Shaft for M-T, Tension Meter, Tension Hoist, Hand Winch, Voltage, Detector, Insulated Ladder, Catenary Measuring.</p>





MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
3	<b>GARDU LISTRIK</b> (Khusus Kereta Rel Listrik / KRL)	Fixed Contact, Moving Contact, Movable Arc. Contact HSCB, Fixing Arc. Contact_HSCB, Voltage Sensor, UPS Remote Control, Module Do, Modul D1 Modern. Module CPU, Power Unit, Power Unit Signal Hut/cabin, Open Current Relay, Motor Charging, Isolating Measuring Amplifier, Relay 126C, Board 1500 VRS in Te (RSS), Rectifier 3 Mw, Auxiliaries Borad in RSS, Automatic Programmable, Low Voltage, Cable Including, Cable DC 1500 V, Lighting Arrester in Circuit Breaker, Cabinet, Earthing System Height Speed Circuit Breaker, Vacuum Circuit Breaker, Remote Supervisory control, Fuse Element, Auxiliary Relay, Delta I relay, DC Reverse, Current Relay, DC Recording Ammeter, Closing Coil, Tripping Coil, Battery for Substation, CR 700 - 2 Subracks for Central Controller, PS 951 Power Supply Module, CPU Module for Central Task, Adaptor Casing, TM 11 SL Transmission, 490 Front Connector for Screw Terminal, 430 - 7 Digital Inpit Module, IM 306 interface module for 35-11 SU/F, Central Unit "CUDI" with Drop, Digital Signal Channel V24, Regenerative Repeater 2G, Line Up Terminal Unit LTC, Modem MD 124, Capcitor, Disconnecting Switch, Test Equipment, Tool for Substation
4	<b>SISTIM TELEKOMUNIKASI KERETA API</b> a. <b>SISTIM RADIO MIKROWAVE DIGITAL /ANALOG KERETA API</b>  b. <b>SISTIM ANTENA PARABOLA</b>  c. <b>SISTIM CATU DAYA</b>  d. <b>PERALATAN DIGITAL/ ANA- LOG MULTIPLEKS</b>  e. <b>TRAIN DISPATCHING SYS- TEM (SISTIM PENGATURAN PERJALANAN KERETA API)</b>  f. <b>REMOTE CONTROL SUPER- VISORY SYSTEM</b>	Digital Transmitter : Modulator, Up. Converter, Local Oscilator, Amplifier RF. Digital Receiver : Demodulator, Down Converter, Local Oscilator, Amplifier RF.  2M Gridpak Antene, 3 M Gridpak Antene, 4M Gridpak c/w Mounting, Tower.  Generator : Genset, Rectifier, Battery, Panel Distribution, Filter Solar Cell : Solar Cell, Panel Solar/Control FLC, Rectifier, Battery.  Third Order Multiplex, Second Order Multiplex, Primary PCM Multiplex, Drop/Insert Multiplex, FDM Multiplex, Terminating Circuit Card.  Terminal Equipment, Relay Station Vhf, Link Equipment, Way Station Radio, Way Wire Station, Locomotive Radio, Utility Radio System Base Station Radio, URS Way Station Radio, URS Locomotif Radio, TD Logger Cartridge Tape, Lokomotif Radio .  RSCC Regional Control Centre, Combined SCC/RSCC, Sub Station, Sensor Accessories .



MENTERI KEUANGAN

NO	KELOMPOK	NAMA BARANG
	g. SUKU CADANG, PERALATAN UJI DI BALAI YASA	Radio Link Equipment Spare Unit, Power Supply Equipment Spare, PCM Multiplex Spare Unit, Train Dispatching System Spare Unit, Supervisory System Spare Unit, Test Equipment Microwave, Test Equipment PCM Multiplex, Test Equipment Spare Centre, Test Equipment Maintenance, Training Equipment, Workshop Facilities.
	h. SENTRAL TELEPON OTOMAT KERETA API (TOKA)	Basic system Equipment, Processor Magazine, Common Cards, Port Cards, Line Filter Magazine, Group Switch Magazine, Power Equipment.
	i. JARINGAN TELEX KERETA API	TWKP, KLV, T 100, T 1000 S, AT & T.
	j. SALURAN FISIK	Fibre Optic Cable, Ground Cable, Open Wire, Air Cable, Drop Wire, XLPE Cable.
5	JALAN REL DAN JEMBATAN KERETA API	Rail Switch/Turn out, Rail Fastening, Sleeper (Bantalan), Steel Bridges.
6.	FASILITAS STASIUN KERETA API	System Tanyangan Jadwal KA, CCTV untuk Ticketing KA, Vending Machine (Kartu Ticket KA), Automatic Locker.
III	PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAAN KERETA API	Hand Tie Temper Machine (HTT), Multi Tie Temper Machine (MTT), Ballast Profiling Machine (PBR/USP/SSP), Ballast Compactor Machine (VDM), Ballast Cleaning Machine, Rail Welding Machine (K355 APT), Universal Purpose Machine (TG), Track Recording Car (EM 120), Hydraulic Tamping Machine (HTM), Track Motor Car, Rail Jack, Track Gauge Measurement Device, Rail Optic, Rail Lubricator, Mactrack, Rail Ultrasonic Test, Ultrasonic Thickness Indicator, Toolkit Engine, Rollers For Sliding Bridge, Manual Jack, Hydraulic Jack, Hand Winch, Winch Machine, Air Impact Wrench, Torsion Wrench/ Installation Tool For Bolts, Rivet Cutter, Trolley, Air Compressor Machine, Pneumatic Boring Machine, Pneumatic Riveting Machine, Band Saw Machine, Flame Cutting Machine, Boring Machine, Welding Machine, Gantry Crane, Over Head and Mobile Crane, Rivet Stamping Machine, Grinding Machine/ Profil, Electric Heater Furnace for Rivet, Electric Generator, Welding Generator, Rivet Heater Furnace, Pneumatic Hammer, Hammer Head (Snaper), Driving Die for Rivet, Blasting Machine, Bending Machine, Pulling Machine (Track), Rail Abrasive Cutting Machine, Waterpass (Level), Echo Sounding Devices, Airless Spray Painting, Paint Thickness Meter, Hygrometer, Dew Point Calculator, Magnetic Steel Thermometer, High Strength Bolt/Huck Bolt, Rivet, Ordinary Bolt, Drift Pins, Steel Grid, Paint, Drill Bits, Reamer, Special Steel For Machine Purpose, Water Pump, Tackle Block, Steel Reinforcement, Pneumatic Concrete Breaker, Bubut Roda, Bubut Umum, Mesin Tes Pegas, Bogie, Cam Industry, Equipment : Soil Investigation, Soil Laboratory, Ballast Testing, Geodetic.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Umum

u.b.  
 Kepala Bagian Tata Usaha Departemen

Mustafa Husiq, S.H.  
 NIP 060051103



Menteri Keuangan.

M. D. UPT Perpustakaan  
 ud.  
 3 JEMBER

Bambang Subianto.